



KEMENTERIAN KOORDINATOR
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

FRIEDRICH
EBERT
STIFTUNG

SEKNAS
FITRA



PRESS RELEASE

PENGUATAN APARATUR DESA DALAM IMPLEMENTASI UU DESA YANG PRO POOR DAN INKLUSIF MELALUI SISTEM INFORMASI DESA TERINTEGRASI DI KABUPATEN SUMBA BARAT

Informasi dan data menjadi dua kata kunci dalam pembangunan ditingkat desa. Desa membutuhkan data-data penting ditingkat lokal untuk menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan desa. Desa harus memiliki kedaulatan data untuk dapat membuat perencanaan pembangunan yang baik dan sesuai dengan konteks dan kebutuhannya. Sementara, pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten) memiliki kebutuhan terkait dengan data kawasan yang real untuk dapat melakukan pembangunan desa dalam skala yang beririsan dengan desa lainnya. Melalui penguatan sistem informasi desa dan pengelolaan data maka kebijakan desa yang *pro poor* dan inklusif dapat tercapai dengan tepat.

Berdasarkan Pasal 82 UU Desa, mengamanatkan bahwa masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi terkait dengan rencana dan pelaksanaan pembangunan, hasil musyawarah desa, keuangan desa, informasi lainnya yang terkait dengan pemerintahan desa. Untuk mendukung amanat tersebut maka teknologi dan Informasi perlu dipersiapkan dalam mendukung tata kelola pemerintah desa yang efisien, cepat, transparan, dan berpegang pada kearifan lokal. Akses informasi tersebut dapat menggunakan website desa.

Sejak tahun 2015, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (**Seknas Fitra**) dan Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa & Kawasan (**BP2DK**) dan didukung penuh oleh *Friedrich Ebert Stiftung* (**FES**) dan Kementerian Koordinator Pembangunan Bidang Manusia dan Kebudayaan (**Kemenko PMK**) telah berkolaborasi dalam melakukan penguatan kapasitas aparatur desa dengan sistem informasi desa. Kegiatan ini telah dilaksanakan di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Bima, Kabupaten Sikka, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Toba Samosir. Pada tahun 2019, Program Penguatan Kapasitas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Sistem Informasi Desa dan Kawasan (**Sideka**) akan dilaksanakan di **Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Mamuju**.

Sistem Informasi Desa Terintegrasi merupakan suatu sistem pengelolaan informasi desa yang tidak hanya mampu menampilkan profil desa secara umum tetapi juga postur anggaran. Dengan demikian diharapkan masyarakat desa mampu menggunakan data-data tersebut untuk memperkuat kemandirian dan keberlanjutan pembangunan desanya. Sistem Informasi Desa Terintegrasi ini tidak hanya berbasis website atau teknologi informasi tetapi juga dipadukan dengan sistem informasi yang berbasis ekonomi, sosial dan budaya melalui pemberdayaan aktif warga.

Tujuh Desa yang menjadi pilot project pelaksanaan Sideka di Kabupaten Sumba Barat adalah : Desa Tebara, Desa Kalibukuni, Desa Lapale, Desa Rua, Desa Waihura, Desa Ubu Pede dan Desa Manukuku.***

Contact Person:

- Yenti (081288390820)
- Mian (081280667712)